

# MODAL SOSIAL DALAM AKTIVITAS EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

**Indrawati**

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

## ABSTRAK

*Adanya kecenderungan orientasi pembangunan pada wilayah perkotaan, mengakibatkan kota cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks, bahkan kota selalu menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan perkembangan peradaban. Sektor formal yang selalu menjadi prioritas utama bagi para pencari kerja ternyata tidak menyediakan ruang yang cukup luas karena adanya persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi, sehingga mereka mencari alternatif lain di sektor informal. Salah satu aktivitas sektor informal yang banyak dijumpai di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas.*

*Penelitian ini mengkaji tentang modal sosial pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik Quota Sampling dengan mengambil 20 orang pedagang yang berjualan pada Pasar Senggol belakang MTC Giant.*

*Modal sosial diantara pedagang kaki lima terwujud dalam bentuk: struktur sosial dan norma sosial yang dibangun dalam bentuk organisasi baik formal maupun non-formal; adanya jaringan sosial yang terbentuk karena adanya interaksi diantara pedagang serta adanya Kepercayaan (Trust) diantara sesama pedagang yang menjadi perekat dan pelumas kegiatan mereka berjalan dengan lancar. Meskipun para pedagang telah direlokasi ke tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, namun pada prinsipnya relokasi tersebut mereka ikuti dengan terpaksa, dan mereka masih berharap suatu saat pemerintah akan mengizinkan mereka kembali berjualan di tempat semula meskipun dalam penataan pemerintah dan dikenai biaya seperti yang mereka jalani di tempat yang baru. Secara umumnya para pedagang merasa keberatan dengan relokasi tersebut dan merasa tempat berjualan di Pasar Jongkok yang selama ini mereka tempati lebih strategis dan menguntungkan bagi usaha mereka.*



**Key Work:** *Modal sosial, kebijakan penertiban, pedagang kaki lima*

## 1. Latar Belakang Masalah

Sektor informal sebagai kegiatan dan ekonomi yang memiliki hubungan sosial yang unik, merupakan suatu gejala yang menarik untuk dibicarakan. Kemampuannya bertahan dalam kondisi sulit sekalipun menyebabkan keberadaan sektor informal dipandang sebagai katup pengaman dalam perekonomian perkotaan dan perkembangannya memiliki hubungan yang sangat erat dengan gejala-gejala kehidupan kota lainnya, yang salah satu diantaranya adalah urbanisasi.

Pada umumnya kota-kota di dunia ketiga menunjukkan perkembangan yang sangat cepat, sehingga kota selalu menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan perkembangan peradaban. Hal itu disebabkan karena model pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga cenderung mengacu pada model pembangunan di negara-negara maju yakni memprioritaskan industrialisasi di wilayah perkotaan. Sehingga tidak mengherankan jika kondisi tersebut mempunyai daya tarik yang cukup besar bagi orang-orang dari berbagai wilayah untuk datang ke kota.

Pertumbuhan pesat dari penduduk kota, menyebabkan hampir setengah dari penduduk bumi tinggal di kota-kota besar. Kofi Anan dalam pidatonya mensinyalir bahwa dunia telah memasuki era millenium urban. Hal tersebut ditandai dengan sudah menyentuhnya globalisasi di wilayah pedesaan, namun dampak dari perubahannya tetap berawal dan berakhir di perkotaan. Perubahan ini mempengaruhi struktur lapangan kerja, demografi, kualitas hidup, pengertian tentang bekerja, serta bersatunya persoalan-persoalan lokal, regional dan internasional (A.Ahmad,2002:2).

Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penduduk dunia yang tinggal di perkotaan pada tahun 1990 sudah mencapai 2,3 miliar jiwa dan 61 persen (1,4 miliar) diantaranya tinggal di kota-kota metropolitan di negara-negara berkembang. Pada tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan di negara-negara Dunia Ketiga diperkirakan mencapai lebih dari 2,1 miliar jiwa atau 66 persen dari total jumlah manusia yang hidup di semua kota di seluruh dunia (Todaro,1999:16).

Adanya kecenderungan orientasi pada kota, mengakibatkan kota cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan ataupun dari kota-kota dan tempat-tempat lainnya. Di daerah perkotaan banyak terdapat alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari yang paling halus sampai dengan yang paling kasar, dari yang paling bermoral sampai dengan yang paling tidak bermoral (Suparlan,1984:18).

Arus urbanisasi yang selalu meningkat ke wilayah perkotaan sering kali tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana kota, baik lapangan kerja, sarana perumahan, kesehatan, sanitasi, transportasi dan sebagainya. Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakmampuan



sebagian besar penduduk yang datang ke kota untuk menata diri sesuai dengan tuntutan hidup perkotaan.

Menurut Todaro (19:319), Mantan Presiden Bank Dunia Robert McNamara, secara jelas menyatakan kekhawatiran dan keprihatinannya yang mendalam atas terus melonjaknya jumlah penduduk di daerah perkotaan di berbagai negara tersebut:

“Sebesar apapun manfaat ekonomi yang dibawa oleh para pendatang baru itu akan nampak kerdil apabila dibandingkan dengan seluruh biaya atau masalah-masalah yang akan ditimbulkannya. Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang begitu cepat telah jauh melampaui daya dukung sarana infrastruktur manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang efisien berlandaskan stabilitas politik dan tata hubungan sosial yang mantap. Jangan harap kenyamanan hidup serta keramahtamahan akan terpelihara di kalangan penduduk kota-kota”.

Ketidaksesuaian antara jumlah penduduk kota dengan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam kehidupannya mengakibatkan terjadinya urbanisasi berlebih. Menurut Manning (1985:8) urbanisasi berlebih diartikan sebagai suatu keadaan tidak mampunya kota-kota menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja yang memadai untuk penduduk yang bertambah dengan pesat.

Menurut De Soto (1992:68), berdasarkan hasil penelitian di Kota Lima (Peru), ternyata kepadatan penduduk di kota telah menyebabkan sebagian lahan perkotaan disita oleh perumahan informal, demikian juga kegiatan-kegiatan ekonomi informal terus menunjukkan perkembangannya, salah satu kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan perdagangan. Perdagangan informal umumnya diselenggarakan di jalan-jalan umum tanpa meminta izin dan membayar pajak, namun beberapa diantaranya mendapat dispensasi hukum dengan imbalan membayar pungutan atau retribusi kepada pihak-pihak yang memberi jaminan.

Keberadaan sektor informal pada dasarnya tidak terpisah dari kehidupan sektor formal, karena pada satu sisi sektor informal dapat mendukung perkembangan sektor formal dan disisi lain antara kedua sektor tersebut memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Sebagai contoh kasus, kehadiran penjual makanan di sekitar proyek pembangunan diperlukan oleh para pekerja harian yang dibayar oleh perusahaan formal (Damsar,1997:171)

Beberapa gejala yang telah dikemukakan diatas barangkali ditemukan pada kota-kota di Indonesia. Secara umum laju pertumbuhan penduduk Kota di Indonesia sekitar 4,7 % dan 45 persen dari jumlah penduduk kota di Indonesia berada di sektor informal (Todaro,1999: 321-323). Berdasarkan hasil penelitian Mair dan Soetjipto tahun 1975 sebanyak 65 % angkatan kerja sektor informal di Jakarta terserap di sektor perdagangan. Selanjutnya dari hasil penelitian Hidayat tahun 1978, dimana terdapat 50 % angkatan kerja sektor informal di Jawa terserap pada sektor perdagangan (Rusli,1992:26-27).

Visi Kota Pekanbaru adalah ***"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"***. Sebagai **Kota perdagangan dan jasa, Kota Pekanbaru menjadi kutub perekonomian masyarakat daerah-daerah sekitarnya**, Hal ini mengakibatkan pertumbuhan

penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya pun terus meningkat. Tahun 2012 tercatat jumlah penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,1 juta jiwa atau pertumbuhannya mencapai 4,47 persen. Meski begitu, dari angka tersebut hanya 2 persen akibat kelahiran, sementara 2,47 persen pertumbuhan penduduk akibat masyarakat pendatang. ([www.riaupos.co.id](http://www.riaupos.co.id))

Pembangunan berbagai aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru tidak hanya didominasi oleh kelompok masyarakat ekonomi atas, tetapi juga masyarakat ekonomi bawah dengan segala keterbatasannya berupaya untuk menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat perkotaan. Mereka memanfaatkan kesempatan yang ada meskipun terkesan tidak didukung oleh kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Sebagai kota perdagangan dan jasa, berbagai macam aktivitas perdagangan dan jasa berkembang di Kota Pekanbaru baik formal maupun informal. Salah satu kegiatan perdagangan yang banyak terdapat di Kota Pekanbaru adalah Pedagang Kaki Lima.

Selain memasarkan atau menjual tanaman barang-barang dagangannya pada tempat-tempat keramaian, para pedagang kaki lima sering menggunakan trotoar badan-badan jalan untuk menggelar dagangannya. Hal tersebut sering mendapat perlakuan penertiban dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Kota Pekanbaru. Meskipun demikian, pertumbuhan pedagang kaki lima semakin hari semakin meningkat ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan.

## **2. Masalah Penelitian**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah tentang “Bagaimana Modal Sosial Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru”. Dari masalah penelitian tersebut dapat diturunkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja wujud modal sosial yang dimiliki pedagang kaki lima dalam mempertahankan eksistensinya di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru ?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui wujud modal sosial yang dimiliki pedagang kaki lima dalam mempertahankan eksistensinya di Kota Pekanbaru
- b) Untuk menganalisis persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan informasi bagi para ilmuwan dan para peneliti yang berminat memperdalam kajian tentang sektor informal di perkotaan, khususnya berkaitan dengan pedagang kaki lima

- b) Sebagai masukan bagi pemerintah Kota dan instansi terkait guna mengambil kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima

#### 4. Tinjauan Pustaka

Menurut Sethuraman, istilah “sektor informal” biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan berikut ini. Sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan. Breman menambahkan, bahwa sektor informal tercakup dalam istilah umum “usaha sendiri” (Manning, 1985:90).

Selanjutnya Castell dan Portes mengemukakan bahwa sektor informal meliputi semua aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang tidak diatur oleh negara dalam lingkungan sosial dimana aktivitas yang sama diatur. Ditambahkan, perbedaan antara formal dan informal bukanlah terletak pada karakter dari produk akhir, tetapi atas cara dimana mereka diproduksi atau dipertukarkan. Menjamurnya aktivitas ekonomi sektor informal tersebut dipandang sebagai suatu kegiatan yang mudah untuk masuk kedalamnya. Namun kalau kita lihat lebih jauh kedalamnya, maka akan didapati jaringan-jaringan sosial yang membaluti aktivitas ekonomi sektor infirmal (Damsar, 1997:160-164).

Untuk menggambarkan struktur perekonomian kota di Dunia ketiga McGee memakai analisis Geertz mengenai struktur perekonomian Kota Mojokuto. Geertz (1989:4) memaparkan bahwa struktur perekonomian Kota Mojokuto terbagi kedalam dua bagian-pertama, perekonomian firma “dimana perniagaan dan industri berlangsung melalui seperangkat pranata sosial yang impersonal, yang mengorganisir pelbagai pekerjaan berspesial dengan memperhatikan tujuan-tujuan produksi dan distribusinya yang utama. Bagian yang kedua merupakan perekonomian bazaar yang didasarkan atas “kegiatan-kegiatan tidak terikat yang dilakukan oleh sekumpulan pedagang komoditi yang bersaing ketat dan berhubungan satu sama lain melalui sejumlah besar transaksi yang ad hoc (tidak menentu) .

Pedagang Kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan sektor informal diartikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan, yang dilakukan secara berpindah-pindah dengan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum. Waskito S dalam Yetty Sarjono, 2005:47)

Menurut Ramli (2003), pedagang kaki lima diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas. Pedagang kaki lima menurut An-nat (1983) dalam (Damsar, 2009:70) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter

lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Karafir (1977:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah.

Fukuyama menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam sebuah komunitas (Francis Fukuyama, 2002:18) Menurut Robert D. Putnam, definisi modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Field, 2011: 51). Fukuyama (2002) berpendapat bahwa unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (*trust*) yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan (*trust*) orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. Sebagaimana menurut Pretty dan Ward (Lubis, 2000) sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama.

## 5. Metode Penelitian

### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Pekanbaru. Mengingat pedagang kaki lima terdapat di berbagai kawasan di kota Pekanbaru, penulis membatasi penelitian di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru khususnya pasar Pasar Senggol belakang MTC Giant.

### Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima yang telah menempati Pasar Snggol belakang MTC Giant Jalan HR.Subrantas Pekanbaru yang berjumlah lebih kurang 200 pedagang. Sedangkan responden adalah 20 orang pedagang yang ditetapkan berdasarkan teknik Quota Sampling dengan beberapa informan kunci (key informant)

### Tehnik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang berkaitan pedagang kaki lima, maka penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara terpimpin (guide interview), dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data secara langsung

Pengamatan langsung (Observation), dilakukan untuk melengkapi data serta melihat secara langsung aktivitas yang terjadi di lokasi. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dengan beberapa tehnik diatas disusun kedalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan cara membuat narasi untuk masing-masing kriteria yang dibahas. Sehingga diharapkan data yang dikemukakan dapat dipahami dan menggambarkan kenyataan yang penulis dapatkan di lapangan.

## 6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter, luas wilayahnya adalah 632.26 Km<sup>2</sup>. Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, wilayah ini terbagi atas 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa.

Sejalan dengan Visi Kota Pekanbaru yang telah dikemukakan di atas, **Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu harus didukung oleh berbagai fasilitas.** Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kota ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Untuk transportasi laut tersedia 2 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Pekanbaru dan Pelabuhan Perawang. Untuk industri tersedia kawasan industri yaitu Kawasan Industri Tenayan yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi.

Untuk mengetahui kondisi penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan masing-masing kecamatan serta tingkat kepadatannya, dapat dilihat table berikut:

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Serta Luas Wilayah  
Kota Pekanbaru Tahun 2008

No	Kecamatan	Banyak Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Tampan	4	59,81	101.661	1.699
2	Bukit Raya	4	22,05	85.697	3.886
3	Lima Puluh	4	4,03	44.565	11.058
4	Sail	3	3,26	23.379	7.171
5	Pekanbaru Kota	6	2,26	31.355	13.874
6	Sukajadi	7	3,76	55.986	14.890
7	Senapelan	6	6,65	39.436	5.930
8	Rumbai	5	128,85	51.258	399
9	Tenayan Raya	4	171,27	99.879	583
10	Marfoyan Damai	5	29,74	126.316	4.427
11	Payung Sekaki	4	43,24	73.205	1.693
12	Rumbai Pesisir	6	157,33	60.477	384
	Jumlah	58	632.26	799.213	1.264

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, BPS 2009

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2008 sebanyak 799.213 jiwa dengan luas wilayah 632,26 Km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.264 jiwa// Km<sup>2</sup>. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Marfoyan Damai dan diikuti oleh Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Sail.

### **b. Karakteristik Responden**

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari lapangan diketahui bahwa umur para responden berkisar antara 30 – 55 tahun dan sebagian besar beumur antara 36 – 45 tahun, dengan agama Islam dan Kristen Protestan (mayoritas Islam). Lama menjadi pedagang kaki lima rata antara 10 - 20 tahun di wilayah Kota Pekanbaru meskipun secara berpindah-pindah, namun di lokasi Pasar Jongkok rata-rata masih kurang dari 1 tahun. Para responden umumnya berasal dari suku bangsa Minangkabau, dan sebagian lagi Batak dan Jawa. Sedangkan tingkat pendidikan para responden rata-rata sedang yakni Tamat SD (18 %), Tamat SMP (36 %) dan SMA (47 %). Modal awal responden bervariasi antara Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000 yang diupayakan sendiri maupun dari bantuan keluarga. Sedangkan pendapatan rata-rata responden sebelum pindah ke Pasar Jongkok belakang MTC Giant berkisar antara Rp.100.000 – Rp.150.000 per hari, namun pada lokasi baru kondisinya relative mengalami penurunan.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya yang selama ini berjualan di Kawasan Pasar Jongkok Purwodadi, merasakan bahwa lokasi tersebut cukup strategis dan memberikan pendapatan yang cukup besar, sehingga mereka tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hal ini terlihat dari pendapatan mereka yang rata-rata hampir dua kali lipat UMK Pekanbaru

### **c. Modal Sosial Pedagang Kaki Lima**

Beberapa indikator modal sosial yang dapat ditemukan pada aktivitas pedagang kaki lima di Pasar Jongkon antara lain:

- 1) Adanya struktur sosial dan norma sosial yang dibangun dalam bentuk organisasi baik formal maupun non-formal. Organisasi disusun karena diperlukan adanya pembagian tugas dan wewenang untuk para anggotanya. Untuk pedagang kaki lima yang berada di Wilayah Kecamatan Tampan telah dibentuk Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kecamatan Tampan). Asosiasi ini menjadi penghubung antara PKL dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyampaikan aspirasi serta tuntutan-tuntutan mereka serta membuat kesepakatan dalam hal penertiban dan relokasi pedagang kaki lima. Selain asosiasi tersebut, diantara PKL juga terbentuk organisasi informal yang tidak terlalu mengikat dengan yang lebih berorientasi pada kepentingan sosial seperti arisan, bantuan sukarela untuk pedagang yang mendapatkan musibah dan sebagainya. Sedangkan norma sosial yang mereka dukung secara bersama antara lain berkaitan dengan masalah keamanan dan kebersihan.



Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa 78 % dari responden menyatakan organisasi baik formal maupun non-formal itu penting, sedangkan 22 % mengatakan kurang penting karena tidak banyak dari aspirasi mereka yang belum dapat diwujudkan.

- 2) Adanya jaringan sosial yang terbentuk karena adanya interaksi diantara pedagang. Dalam jaringan ini terjadi interaksi antar anggota dan antar kelompok. Kesamaan tempat usaha, kesamaan bentuk usaha, kesamaan asal daerah, dan kesamaan-kesamaan lain dapat memperat jaringan sosial ini. Dengan jaringan sosial yang mantap akan menghasilkan suatu nilai tambah yang berbentuk suatu nilai tawar (*bargaining power*). jaringan sosial antar kelompok dapat terjadi apabila di dalam kelompok tersebut tidak ada memenuhi kebutuhan akan pasar dan juga kebutuhan para anggotanya. Para Pedagang dapat meminjam jenis barang yang dijual oleh pedagang lain jika dibutuhkan dan menggantinya kembali. Bahkan dapat menitip barang yang dibutuhkan kepada pedagang yang akan membeli barang ke daerah lain.

Berdasarkan hasil penelitian 24 % pedagang menyatakan sering meminjam barang dagangan kepada pedagang lain, 31 % menyatakan kadang-kadang, sedangkan 45 % menyatakan belum pernah. Sedangkan pinjam meminjam tukar menukar uang dalam aktivitas sehari-hari umumnya biasa mereka lakukan.

- 3) Adanya Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan merupakan indikator modal sosial dimana seseorang akan mampu membuat akses lebih jauh dalam usaha. Kepercayaan yang terbentuk adakan dapat mendukung permodalan, akses sosial, kelancaran komunikasi dan interaksi sesama anggota dalam jaringan sosial. Para pedagang kaki lima di Pasar Senggol sering mendapat pinjaman berupa uang maupun barang dari sesama pedagang, pinjam meminjam tersebut dilakukan secara spontan seperti uang kembalian pembeli yang kurang, atau barang yang dibutuhkan pembeli ukurannya tidak tersedia sehingga mereka meminjam kepada pedagang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 27 % responden menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan kepada semua pedagang yang ada di Pasar Senggol, 15 % menyatakan lebih percaya kepada pedagang yang dulunya sama-sama berjualan di Pasar Jongkok, sedangkan 58% lebih percaya pada pedagang yang memiliki daerah asal yang sama atau memiliki hubungan keluarga.

#### **d. Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Penertiban Yang Dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru**

Dalam kegiatannya para pedagang kaki lima biasanya memanfaatkan tempat-tempat yang dianggapnya strategis untuk berdagang, tanpa memikirkan apakah tempat tersebut boleh atau tidak untuk digunakan sebagai lokasi berdagang. Prinsip ada gula ada semut serta konsep pembeli adalah raja menjadi acuan bagi pedagang untuk menjual barang dagangannya, sehingga tidak jarang keberadaan pedagang kaki lima terkesan mengganggu ketertiban dan keindahan

kota. Mereka sering menggunakan taman kota, trotoar bahkan badan jalan sebagai tempat berjualan, sehingga dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Kondisi inilah yang memicu pemerintah Kota untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil pengamatan beberapa lokasi yang sering mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima adalah, Jl Cut Nyak Dien dan sekitarnya dan Jalan HR.Subrantas dan sekitarnya, karena di kawasan ini banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Salah satu kawasan yang akhir-akhir ini sangat dirasakan memerlukan upaya penertiban adalah keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Jongkok kawasan Purwodadi yang setiap hari menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut.

Satu tahun belakangan ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan satu lokasi baru bagi pedagang kaki lima yakni di belakang MTC Giant untuk merelokasi ratusan pedagang kaki lima. Di lokasi tersebut disediakan sekitar 900 lapak untuk menampung para pedagang yang biasanya berjualan di kawasan Jalan Cut Nyak Dien atau di belakang kantor gubernur dan kawasan Pasar Jongkok Panam, guna menghindari kemacetan yang terjadi hampir setiap hari.

Namun upaya tersebut tidak langsung disambut positif oleh para pedagang, sehingga pemerintah akhirnya melakukan penertiban secara paksa dengan menurunkan aparat kepolisian yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, 47 % responden menyatakan keberatan dengan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, 25 % setuju demi ketertiban kota, sedangkan 28 persen menyatakan pasrah dengan kebijakan pemerintah. Mereka yang pasrah menyatakan ini sudah merupakan konsekuensi dari orang kecil, mereka tidak sanggup menolak apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah yang penting mereka masih dapat melanjutkan kehidupan keluarga.

Para pedagang merasa keberatan karena selama berjualan di Pasar Jongkok mereka tidak dikenakan sewa lapak seperti yang terjadi saat ini. Mereka harus mengeluarkan uang sewa lapak Rp 450.000 per bulan tanpa adanya pembayaran lainnya, sedangkan pada waktu mereka berjualan di Pasar Jongkok mereka hanya membayar restribusi harian kepada pihak keamanan atau pemuda setempat. Disamping itu mereka juga merasa bahwa lokasi pasar jongkok cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya sehingga akses orang untuk berbelanja lebih mudah.

Menurut Riadi sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kecamatan Tampan ‘‘Walau sudah mulai menata lapak, kami masih berkeinginan untuk berjualan di Pasar Jongkok. Karena untuk mulai merintis pasar dan mencari pelanggan sangat sulit dan memerlukan waktu setahun hingga dua tahun, makanya kami masih berharap jika seandainya pihak Pemko mengizinkan kami untuk berjualan di lokasi lama dengan penataan dari Pemko,’’

Dengan terjadinya kasus kebakaran di kawasan Pasar Senggol beberapa waktu yang lalu, membuat para pedagang bertambah resah, karena merasa penertiban dan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Kota tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, padahal mereka telah membayar sewa bulanan



kepada Pemerintah Kota. Hal ini menyebabkan para pedagang beranggapan pemerintah telah gagal menciptakan lokasi berdagang yang nyaman dan serta tertata bagi para pedagang kaki lima.

## KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Senggol belakang MTC Giant pada umumnya berusia antara 30 – 55 tahun, mayoritas beragama Islam. Lama berjualan di lokasi Pasar Jongkok rata-rata masih kurang dari 1 tahun. Para responden umumnya berasal dari suku bangsa Minangkabau, dan sebagian lagi Batak dan Jawa. Sedangkan tingkat pendidikan para responden rata-rata sedang yakni Tamat SD (18 %), Tamat SMP (36 %) dan SMA (47 %). Modal awal responden bervariasi antara Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000 yang diupayakan sendiri maupun dari bantuan keluarga. Sedangkan pendapatan rata-rata responden sebelum pindah ke Pasar Jongkok belakang MTC Giant berkisar antara Rp.100.000 – Rp.150.000 per hari, namun pada lokasi baru kondisinya relatif mengalami penurunan, apalagi dengan peristiwa kebakaran sebagian besar diantara pedagang mengalami kerugian.
- b. Modal sosial diantara pedagang kaki lima terwujud dalam bentuk: Adanya struktur sosial dan norma sosial yang dibangun dalam bentuk organisasi baik formal maupun non-formal; adanya jaringan sosial yang terbentuk karena adanya interaksi diantara pedagang. Dalam jaringan ini terjadi interaksi antar anggota dan antar kelompok; adanya Kepercayaan (Trust) 78 % dari responden menyatakan organisasi baik formal maupun non-formal itu penting, sedangkan 22 % mengatakan kurang penting karena tidak banyak dari aspirasi mereka yang belum dapat diwujudkan. Untuk pinjam meminjam, 24 % pedagang menyatakan sering meminjam barang dagangan kepada pedagang lain, 31 % menyatakan kadang-kadang, sedangkan 45 % menyatakan belum pernah. Kepercayaan juga terbentuk diantara pedagang, 27 % responden menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan kepada semua pedagang yang ada di Pasar Senggol, 15 % menyatakan lebih percaya kepada pedagang yang dulunya sama-sama berjualan di Pasar Jongkok, sedangkan 58% lebih percaya pada pedagang yang memiliki daerah asal yang sama atau memiliki hubungan keluarga.
- c. Pada umumnya para pedagang merasa tidak setuju dengan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, mereka merasa lokasi berdagang mereka di Pasar Jongkok cukup strategis, tidak becek, ramai dan memberikan pendapatan yang relatif baik. Mereka sangat berharap jika pemerintah mengembalikan mereka ke tempat semula meskipun dengan penataan dan pembayaran sewa yang ditetapkan oleh pemerintah

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Ahmadin.2002. Re Desain Jakarta 2020, Tata Kota Tata Kita. Jakarta, Kotak Kita Press
- Damsar.1997. Sosiologi Ekonomi, Jakarta, Grafindo Persada
- Evers,Hans-Dieter dan Rudiger Korff, 2002. Urbanisasi di Asia Tenggara, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Fukuyama,Tejemahan Ruslaini.2002. Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Yogyakarta, Qalam
- Robert Lawang. 2005. Kapital Sosial, Jakarta, Fisip UI Press
- Todaro,Michael,P.1999. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Keenam. Jakarta. Erlangga
- Cris Manning, Tajuddin Noer Efendi, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Onformal di Kota,Pusat Penelitian Studi Kependudukan UGM,Gramedia Jakarta
- Sarjono Yetty.2005. Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan Pendekatan Kualitatif. Surakarta.Muhammadiyah University Press
- Suparlan,Parsudi.1984. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta. Sinar Harapan dan Yayasan Obor
- Singarimbun,Masri dan Sofian Effendi, 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

